

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang menetapkan prinsip desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan prinsip desentralisasi. Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Dalam suatu daerah otonom atau bersifat administratif, segala sesuatunya didasarkan pada peraturan Undang - Undang. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah yang secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas sumber daya alam , kemampuan sumber daya manusia (aparap dan masyarakat), kemampuan dalam manajemen, kondisi sosial dan budaya negara, karakteristik lingkungan. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Perubahan politik nasional yang sejalan dengan pergantian pemimpin telah memicu perubahan-perubahan penting di suatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud tertuang dalam kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

paradigma dari sistem pemerintah yang bercorak sentralisasi mengarah pada sistem pemerintahan yang desentralisasi. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud.²

Secara otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan asas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Optimalisasi pengelolaan dana publik diartikan bahwa daerah dituntut menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan menggunakan sumber daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten atau masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.³

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan bahwa dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan

² Diah Nurdiwaty, dkk, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017), h.47-48.

³ Mohamad Nur Afandi dan Ropen Sianipar, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 19, No. 2, 2016, hal. 1

harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.⁴ Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kerja. Sehingga, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntunan besarnya pembiayaan atas sasaran yang ingin dicapai.⁵ Kemampuan dan potensi daerah dalam mengelola keuangan diharapkan mampu mewujudkan daerah yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun, dalam kenyataannya belum semua daerah dapat mengelola keuangan dan mengembangkan sumber daya daerah yang dimiliki secara optimal dalam melaksanakan kinerjanya.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran⁶. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

⁵ Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta ; Salemba Empat), hal. 232

⁶ Anastasia, M. 2012. Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Karyawan Dalam Usaha Meningkatkan Kinerja Pada PT Roda Surya Adimas Banjarmasin. *Jurnal 35 Kindai* vol 8 no2, 147-159.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian unit kerja didalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.⁷ Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah menggunakan 5 rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Pertama, Rasio kemandirian merupakan rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah semakin tinggi.⁸

⁷ Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..., hal. 135

⁸ Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hal. 140

Kedua, Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.⁹ Ketiga, Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara pengeluaran (*output*) dengan pemasukkan (*input*) biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.¹⁰

Keempat, Rasio aktivitas atau rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja operasi ialah analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah dan belanja modal adalah belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.¹¹

Kelima, Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode satu ke periode berikutnya baik dilihat dari pendapatan maupun belanja.¹² Dengan menggunakan rasio ini akan terlihat apakah pendapatan maupun belanja mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan khususnya pada pertumbuhan pendapatan tersebut mengalami

⁹ Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..., hal. 141

¹⁰ Ibid., hal. 141

¹¹ Ibid., hal. 141

¹² Ibid., hal. 141

kenaikan atau positif.¹³ Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Sebab jika tidak maka akan mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.¹⁴

Penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan rasio keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya yaitu Amanda Rizka Hendyta (2015), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 – 2013. Menunjukkan bahwa rasio kemandirian 10,96% yang berarti Kabupaten Lamongan cukup mandiri dalam membiayai kepentingan daerah melalui PAD yang diterima. Rasio ketergantungan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata sebesar 75,22% yang berarti “Sangat Tinggi”. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata 7,61% yang berarti “Sangat Kurang”. Rasio efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan “Sangat Efektif” dengan tingkat efektivitas 113,4%. Rasio efisiensi pendapatan Kabupaten Lamongan 2009-2013 memiliki kecenderungan “Kurang Efisien”, dengan tingkat efisiensi 94,71%. PAD mengalami pertumbuhan

akan tetapi pertumbuhannya menurun dari tahun 2010 hingga 2011.

Sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan 4,66%.¹⁵

¹³.Ibid., hal. 141

¹⁴ Ibid., hal. 141

¹⁵ Rizka Hendyta, " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 – 2013", (Skripsi: Universitas Negeri Surabaya 2015)

Penelitian Zakaria Ansori (2019), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018. Hasil penelitian bahwa dalam merealisasikan PAD dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang relatif sedikit Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun demikian tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.¹⁶

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten/daerah yang diberi hak otonomi atas daerahnya masing-masing untuk mengatur sendiri pemerintahannya guna melaksanakan pembangunan dan kegiatannya. Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2009-2018 Kabupaten Lamongan dilihat dari rasio kemandirian masih tergolong rendah, efektivitas dalam pengelolaan PAD sudah sangat efektif, dan PAD mengalami pertumbuhan akan tetapi pertumbuhannya menurun. Dengan demikian, penelitian ini ingin melanjutkan terkait penilaian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2019-2022 untuk melihat sejauh mana perkembangan dalam pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

¹⁶ Zakaria Anshori, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan)", Volume 4 No. 2, Juni 2019, hal 113

Tabel 1.1
Data Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2019	2.864.496.711.416,86	2.875.512.218.177,60
2020	2.838.272.211.782,49	2.823.137.926.114,77
2021	2.975.019.936.520,51	2.871.007.882.801,56
2022	2.933.713.997.200,59	3.188.162.740.326,07

Sumber :Dok. BPKAD Kabupaten Lamongan, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, Kabupaten lamongan dalam menjalankan otonomi daerah mengalami perkembangan yang kurang pesat yang mana hal ini dapat dilihat pada selalu meningkatnya pendapatan daerah yang fluktuatif sekaligus besaran pendapatan daerah yang selalu lebih kecil dibandingkan belanja daerah pada tahun 2020 dan 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten lamongan dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4.¹⁷ Namun disisi lain, jika dilihat pada besaran antara pendapatan daerah dan belanja daerah, pendapatan daerah selalu lebih besar daripada belanja daerah. Jika pendapatan daerah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan, maka kinerja keuangan dapat dikatakan telah berjalan dengan maksimal. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan daerah yang diperoleh

¹⁷ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kab Lamongan.*

lebih sedikit dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan maka kinerja keuangan dikatakan kurang maksimal dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan yang baik tidak cukup hanya dibutuhkannya SDM yang kompeten melainkan daerah harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga dari dua hal tersebut saling berkaitan yang mana akan menghasilkan sasaran, tujuan, visi dan misi sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dalam iuran pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian maka, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik dapat dikategorikan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dan kemandirian di sektor finansial untuk membiayai sendiri pelaksanaan otonomi di daerahnya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan pada analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2019-2022. Sebagaimana untuk menganalisis pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, akan diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat atau menurun setiap tahunnya. Selain itu dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah berharap agar kinerja keuangan di masa yang akan datang menjadi lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019–2022”**

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yaitu:

1. Kemandirian dan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi yang tercermin dari besarnya bantuan dari sudut anggaran masih dalam kategori tinggi.
2. Rendahnya kemampuan daerah dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2019-2022 ?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019-2022 ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2022 ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Aktivitas Tahun Anggaran 2019-2022 ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2019-2022 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2019-2022.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019-2022.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2022.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Aktivitas Tahun Anggaran 2019-2022.

5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dilihat dari Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2019-2022.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam hal analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan untuk mengetahui bagaimana daerah melakukan otonomi daerah. Serta manfaat untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan yang berkaitan dengan analisis keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2019-2022.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2019-2022 agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja keuangan pada periode berikutnya.

b. Bagi Akademik

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan penyusun APBD serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumbangsih pustaka acuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, agar lebih efektif serta efisien dan penelitian sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan. Dengan melihat rumusan masalah maka perlu adanya batasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Lamongan tahun anggaran yang diteliti adalah tahun 2019-2022. Agar permasalahan yang dibahas fokus pada yang diharapkan maka dibatasi dengan menggunakan lima rasio keuangan.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka peneliti ini menggunakan data langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan. Penelitian ini hanya dibatasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019-2022.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah yang menyajikan data keuangan secara terstruktur atas transaksi yang dilakukan.¹⁸

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.¹⁹

¹⁸ Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 7

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan tingkat kinerja atau pencapaian atas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai maksud, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah.²⁰

d. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari eksternal atau luar serta menggambarkan seberapa besar tingkat partisipasi atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan masyarakat.²¹

2) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.²²

3) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli

²⁰ Muhamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPF, 2013), hal. 25

²¹ Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 233

²² Baso R, Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba“, *Tangible Journal*”, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 45

daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil nilai rasio ini semakin baik).²³

4) Rasio aktivitas/keserasian

Rasio aktivitas/keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.²⁴

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode satu ke periode berikutnya dilihat dari pendapatan maupun belanja.²⁵

2. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual di atas, penelitian yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019–2022 penelitian ini untuk

²³ Nur Hasanah dan Elok Dwi Vidiyastutik, *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo*, *Jurnal Ecobuss*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 29

²⁴ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal. 140

²⁵ Rigel Nurul Fathah, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian...*, hal. 45

menguji apakah teori yang sudah dijelaskan di atas dapat dibuktikan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dari masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian, kegunaan, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, dan juga definisi operasional. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.